

## **DAMPAK PENERAPAN IFRS DI NEGARA BERKEMBANG – PERBANDINGAN LINTAS NEGARA**

**Andrew Fong – [andrewfong@ui.ac.id](mailto:andrewfong@ui.ac.id)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2015)**

### **Abstrak**

Standar akuntansi merupakan sebuah pedoman yang dibuat untuk memberikan suatu gambaran umum dalam membuat laporan keuangan. Salah satu standar akuntansi yang banyak digunakan saat ini adalah *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif yang membandingkan dua data atau lebih untuk memberikan suatu gambaran umum mengenai hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak penerapan IFRS pada berbagai sektor industri di negara berkembang. Negara-negara yang digunakan dalam penelitian ini: Indonesia, China, Bangladesh, Nepal, Brazil, Vietnam, dan Irak pada periode penerapan IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan IFRS di negara-negara berkembang masih memiliki berbagai kendala sehubungan dengan regulasi dan pengetahuan standar IFRS.

### **Abstract**

*Accounting standards are a guideline created to provide an overview to make financial statements. One of the accounting standards that are widely used today is the International Financial Reporting Standards (IFRS). This study uses descriptive method that compares two or more of data to give a general overview of the study. This study uses data from previous studies on the impact of IFRS implementation in the various industrial sectors in developing countries. Countries that used in this study: Indonesia, China, Bangladesh, Nepal, Brazil, Vietnam, and Iraq during the period of application of IFRS. The results shows that the effect of applying IFRS in developing countries still have some issues due to regulations and knowledge of IFRS standards.*

### **Pendahuluan**

Standar akuntansi merupakan sebuah pedoman yang dibuat untuk memberikan suatu gambaran umum dalam membuat laporan keuangan. Salah satu standar akuntansi yang banyak digunakan saat ini adalah *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. IFRS adalah standar dan kerangka yang diadopsi oleh badan penyusun standar akuntansi internasional bernama *International Accounting Standards Board (IASB)*. Sebelum standar IFRS diperkenalkan, standar ini dikenal dengan nama *International Accounting Standards (IAS)* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee (IASC)*.

Berbagai penelitian sudah menilai dampak penerapan IFRS disetiap sektor industri diberbagai negara (Heykal et al. [2014], Poudel et al. [2014], dan Nurunnabi [2014]). Hasil penelitian-penelitian ini memberikan gambaran akan pentingnya adopsi IFRS, perlunya regulasi dalam pengadopsian, dan dampak dari pengadopsian IFRS. Pada kasus negara Indonesia, standar yang digunakan bukan secara langsung mengadopsi IFRS, melainkan mengkonvergensi IFRS menjadi sebuah standar yang lebih sesuai diterapkan di negara Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Adanya perbedaan dalam penerapan IFRS pada negara Indonesia ini menjadi fokus utama penelitian ini yang ingin membandingkan penerapan IFRS antara negara Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan suatu

gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan penerapan IFRS di negara-negara berkembang. Penelitian ini mengacu pada penelitian milik Zehri dan Chouaibi (2013) yang meneliti mengenai faktor-faktor dalam mengadopsi IFRS pada negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berkembang lebih baik mengadopsi IFRS karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi dan *common law* berdasarkan sistem legal. Penelitian Zehri dan Chouaibi (2013) juga meninggalkan pertanyaan mengenai dampak IFRS dalam praktik akuntansi di negara berkembang.

Sehubungan dengan dampak IFRS dalam negara berkembang, sudah ada beberapa penelitian yang meneliti pengaruh penerapan IFRS ini dalam masing-masing negara. Penelitian Heykal et al. (2014) yang meneliti dampak penerapan IFRS pada bank di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen aset keuangan telah disesuaikan kembali setelah penerapan PSAK 50 dan 55. Penelitian Nurunnabi (2014) yang meneliti dampak penerapan IFRS di negara Bangladesh menunjukkan bahwa kerangka peraturan akuntansi dan pengaruh politik menghambat pelaksanaan IFRS yang efektif di Bangladesh. Penelitian Poudel et al. (2014) meneliti pengaruh IFRS di Nepal yang menunjukkan bahwa penerapan IFRS kemungkinan akan bermasalah karena lingkungan kontekstual negara dan ada kekurangan akuntan yang berkualitas serta profesi akuntansi yang tidak siap untuk mengadopsi IFRS. Penelitian Phan dan Mascitelli (2014) meneliti pengaruh penerapan IFRS di Vietnam menunjukkan bahwa adanya hambatan penerapan IFRS karena kurangnya pengetahuan dan perbedaan lingkungan ekonomi yang mengharuskan adanya kebijakan dalam penerapan IFRS. Penelitian Hassan et al. (2014) meneliti dampak penerapan IFRS di Irak menunjukkan bahwa penerapan IFRS perlu sejalan dengan reformasi perlindungan investor dan pemerintah serta pendidikan mengenai investasi untuk membantu penerapannya. Penelitian penerapan IFRS lain muncul di China. Penelitian Ding dan Su (2008) menunjukkan bahwa implementasi konvergensi IFRS secara substansial tidak mengubah laporan keuangan perusahaan. Penelitian Grecco et al. (2014) meneliti dampak penerapan IFRS pada perusahaan publik di Brazil menunjukkan bahwa hambatan penerapan IFRS terletak pada lingkungan regulator.

## Kajian Literatur

*International Financial Reporting Standards* (IFRS) adalah standar dan kerangka yang disusun oleh badan penyusun standar akuntansi internasional bernama *International Accounting Standards Board* (IASB). Penerapan IFRS di Indonesia dimulai pada tahun 2008 sampai 2012, meliputi aktivitas adopsi IFRS, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku dan penerapan PSAK IFRS secara bertahap (Zamzami, 2011). Sampai tahun 2014, konvergensi IFRS telah mencapai (Sinaga, 2014): PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, PSAK 24 tentang Imbalan Kerja, PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66 tentang Pengaturan Bersama, PSAK 67 tentang Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar yang berlaku efektif 1 Januari 2015.

Perbandingan antara standar IFRS dengan PSAK ditunjukkan pada Gambar 1 (Pinnarwan et al., 2014).

IFRS		PSAK		Differences
<b>IFRS 1</b>	<i>First-time Adoption of International Financial Reporting Standards</i>	-	<i>No equivalent standard</i>	IFRS 1 will not be adopted as it has been considered or included in the transitional provisions in the individual standards/interpretations.
<b>IFRS 2</b>	<i>Share-based Payment</i>	<b>PSAK 53</b>	<i>Share-based Payment</i>	PSAK 53 is consistent with IFRS 2 in all significant respects.
<b>IFRS 3</b>	<i>Business Combinations</i>	<b>PSAK 22</b>	<i>Business Combinations</i>	<p>Two standards in key principals are the same, however there are several minor amendments made to IFRS 3 which have not been absorbed by PSAK 22.</p> <p>There is a difference in measuring non-controlling interests where IFRS 3 provides clearer requirements (on present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation) which reduces diversity in the application.</p> <p>IFRS 3 also provides application guidance on all share-based payment transactions that are part of business combinations, including unreplaced and voluntarily replaced share-based payment awards.</p>

<b>IFRS 4</b>	<i>Insurance Contracts</i>	<b>PSAK 62</b>  <b>PSAK 28</b>  <b>PSAK 36</b>	<i>Insurance Contracts</i>  <i>Accounting for Loss Insurance</i>  <i>Accounting for Life Insurance</i>	PSAK 62 is adopted from IFRS 4 except for the requirement in IFRS 4 to measure the insurance liabilities on an undiscounted basis because this contradicts PSAK 28 and PSAK 36.  PSAK 28 and 36 act as complementary to the requirement in PSAK 62.  There are no standards in IFRS/IAS which are equivalent to PSAK 28 and 36.
<b>IFRS 5</b>	<i>Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations</i>	<b>PSAK 58</b>	<i>Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations</i>	PSAK 58 is consistent with IFRS 5 in all significant respects.
<b>IFRS 6</b>	<i>Exploration for and Evaluation of Mineral Resources</i>	<b>PSAK 64</b>	<i>Exploration and Evaluation of Mineral Resources Mining</i>	PSAK 64 is consistent with IFRS 6 in all significant respects.  With the issuance of PSAK 64, PSAK 33 had been superseded.
<b>IFRS 7</b>	<i>Financial Instruments: Disclosures</i>	<b>PSAK 60</b>	<i>Financial Instruments: Disclosures</i>  <i>PSAK 60 (Revised 2014) Financial Instrument : Disclosures will be effective by 1 January 2015</i>	Several amendments made to IFRS 7 subsequent to March 2009 have been absorbed by PSAK 60 (Revised 2014) which will be effective on 1 January 2015 (early implementation is prohibited).
<b>IFRS 8</b>	<i>Operating Segments</i>	<b>PSAK 5</b>	<i>Operating Segments</i>	PSAK 5 is consistent with IFRS 8 in all significant respects.
<b>IFRS 9</b>	<i>Financial Instruments</i>		<i>PSAK 55 adopted from IAS 39, refer to section below on IAS 39 and PSAK 55 for further details.</i>	IFRS 9 has not been adopted in Indonesia. However, previous standards of financial instruments which equivalent to IAS 39 and IFRIC 9 have been adopted through PSAK 55 and ISAK 26. For IFRS reporters, IFRS 9 is effective from 1 January 2015 and can be adopted with immediate effect. IFRS 9 supersedes IAS 39 and IFRIC 9.



<b>IFRS 10</b>	<i>Consolidated Financial Statements</i>	<b>PSAK 65</b>	<p><i>PSAK 4 adopted from IAS 27, refer to section below on IAS 27 and PSAK 4 for further details.</i></p> <p><i>PSAK 4 (Revised 2009) will be replaced by PSAK 65 Consolidated Financial Statements by 1 January 2015</i></p>	<p>PSAK 65 Consolidated Financial Statements (the equivalent of IFRS 10) will be effective by 1 January 2015 (early adoption is prohibited). For IFRS reporters, the standard has been effective since 1 January 2013 . IFRS 10 clarifies definition of control by additional guidelines.</p> <p>Refer to other PwC firm publication "A practical guide to new IFRSs for 2013 and 2014" for further details.</p>
<b>IFRS 11</b>	<i>Joint Arrangements</i>	<b>PSAK 66</b>	<p><i>PSAK 12 (Revised 2009) adopted from IAS 31, refer to section below on IAS 28 and PSAK 15 for further details.</i></p> <p><i>PSAK 12 (Revised 2009) will be replaced by PSAK 66 Joint Arrangements by 1 January 2015.</i></p>	<p>PSAK 66 Joint Arrangements (the equivalent of IFRS 11) will be effective by 1 January 2015 (early implementation is prohibited). For IFRS reporters, the standard has been effective since 1 January 2013. IFRS 11 reduces the types of joint arrangements to joint operations and joint ventures, and prohibits the use of proportional consolidation.</p> <p>Refer to other PwC firm publication "A practical guide to new IFRSs for 2013 and 2014" for further details.</p>
<b>IFRS 12</b>	<i>Disclosure of Interests in Other Entities</i>	<b>PSAK 67</b>	<p><i>PSAK 4, 12 and 15 adopted from IAS 27, 28 and 31, refer to sections below on IAS 27 and PSAK 4; IAS 28 and PSAK 15; IAS 31 and PSAK 12</i></p> <p><i>PSAK 4,12,and 15 will be replaced by PSAK 67 Disclosures of Interest in Other Entities by 1 January 2015</i></p>	<p>PSAK 67 Disclosure of Interest in Other Entities (the equivalent of IFRS 12) will be effective by 1 January 2015 (early implementation is prohibited). For IFRS reporters the standard has been effective since 1 January 2013. IFRS 12 brings together in one standard the disclosure requirements that apply to investments in subsidiaries, associates, joint ventures, structured entities, and unconsolidated structured entities.</p> <p>Refer to other PwC firm publication "A practical guide to new IFRSs for 2013 and 2014" for further details.</p>

<b>IFRS 13</b>	<i>Fair Value Measurement</i>	<b>PSAK 68</b>	<i>Fair value measurement</i>	<p><b>PSAK 68 Fair value measurement (the equivalent of IFRS 13) will be effective by 1 January 2015 (early implementation is prohibited). For IFRS reporters the standard has been effective since 1 January 2013 . IFRS 13 covers fair value measurements and disclosures.</b></p> <p>Refer to other PwC firm publication "A practical guide to new IFRSs for 2013" for further details.</p>
<b>IFRS 14</b>	<i>Regulatory deferral accounts</i>	-	<i>No equivalent standard under PSAK</i>	<p>IFRS 14 has not been adopted in Indonesia. For IFRS reporters, the standard will be effective for annual reporting beginning on or after 1 January 2016 and early application is permitted.</p>
<b>IFRS 15</b>	<i>Revenue from contract with customers</i>		<i>PSAK 23 adopted from IAS 18, refer to section below</i>	<p>IFRS 15 has not been adopted in Indonesia. For IFRS reporters, the standard will be effective for annual reporting beginning on or after 1 January 2017 and early application is permitted</p> <p>IFRS 15 replaces IAS 18 and the standard brings up new model in recognising revenue which will significantly impact some industries.</p>

Gambar 1. Perbedaan IFRS dan PSAK

Penelitian Zehri dan Chouaibi (2013) mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memperjelas pilihan dalam menerapkan IFRS oleh negara-negara berkembang. Hasil menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang paling menguntungkan bagi penerapan IFRS adalah mereka yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi dan *common law* berdasarkan sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengadopsi standar internasional negara-negara berkembang berkaitan erat dengan lingkungan kelembagaan serta data makro ekonomi mereka.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif yang membandingkan dua data atau lebih untuk memberikan suatu gambaran umum mengenai hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak penerapan IFRS pada berbagai sektor industri di negara berkembang. Negara-negara yang digunakan dalam penelitian ini: Indonesia, China, Bangladesh, Nepal, Brazil, Vietnam, dan Irak pada periode penerapan IFRS.

## Hasil Penelitian

1. Dampak Penerapan IFRS di China  
Penelitian Ding dan Su (2008) memberikan analisis deskriptif mengenai penerapan IFRS pada pasar yang diatur oleh pemerintah daripada yang diatur oleh mekanisme pasar. Permasalahan yang membedakan peraturan standar akuntansi di China dan IFRS adalah karena definisi entitas pihak terkait di China tidak termasuk sebagian besar perusahaan milik negara (BUMN), sedangkan IFRS mempertimbangkan semua BUMN sebagai pihak terkait. BUMN China adalah badan hukum independen, dan kegiatan usaha mereka tidak berbeda dari perusahaan lain. Permasalahan kedua adalah mengenai perbedaan pembalikan *impairment* penurunan nilai atas aset tetap. Permasalahan lain yang timbul mengenai penerapan IFRS di China adalah karena manipulasi berlebihan yang ditemukan di banyak perusahaan dan sejumlah besar akuntan belum menerima pelatihan yang memadai di bidang akuntansi dan auditing modern, regulator China tidak yakin apakah standar akuntansi yang diterima secara internasional juga harus diterima di China.
2. Dampak Penerapan IFRS di Bangladesh  
Penelitian Nurunnabi (2014) menyelidiki keseimbangan antara regulasi akuntansi dan pengaruh politik dalam penerapan IFRS di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kerangka peraturan akuntansi dan pengaruh politik menghambat pelaksanaan yang efektif dari IFRS. Terutama, berkaitan dengan peraturan akuntansi, beberapa masalah yang ditemukan seperti inkonsistensi antara peraturan daerah dan IFRS, kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penetapan standar akuntansi, banyaknya regulator, dan kurangnya penegakan hukum. Tingginya tingkat pengaruh politik juga menambah tekanan dalam pelaksanaan IFRS.
3. Dampak Penerapan IFRS di Nepal  
Poudel et al. (2014) meneliti mengenai pengaruh lingkungan akuntansi pada saat penerapan IFRS. Masyarakat Nepal ditandai dengan konservatisme, kolektivisme dan *high power distance*. Keyakinan agama dan sistem kasta merupakan aspek penting dari masyarakat Nepal dan praktik akuntansi tradisional mencerminkan perbedaan budaya dan praktek-praktek perdagangan antar kelompok kasta. Sehubungan dengan IFRS, tidak ada program IFRS yang ditawarkan pada gelar akuntansi di universitas Nepal dan tingkat dalam mengajar IFRS sangat bervariasi antara lembaga. Akibatnya, perekrutan karyawan yang terampil dapat menjadi masalah bagi perusahaan karena ada kekurangan spesialisasi IFRS. Selanjutnya, penerapan IFRS merupakan sebuah beban bagi perusahaan kecil dan menengah yang bertanggung jawab untuk pelatihan mendidik karyawan. Fokus utamanya, adopsi IFRS tidak mungkin mengakibatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Nepal karena mekanisme penegakan hukum yang lemah dan adanya korupsi dan penipuan.  
Secara garis besar, jelas bahwa negara Nepal mengakui manfaat dari penerapan IFRS untuk menarik dana eksternal dari lembaga-lembaga internasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Nepal menghadapi beberapa masalah kontekstual bila menerapkan IFRS. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran apakah standar akuntansi yang dikembangkan dengan pengaruh yang signifikan dari negara-negara industri maju cocok untuk negara-negara berkembang seperti Nepal.
4. Dampak Penerapan IFRS di Brazil  
Penelitian Grecco et al. (2014) mengkaitkan penerapan IFRS pada *earnings management* melalui *discretionary accruals*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi ke IFRS memiliki efek yang membatasi manajemen laba di Brazil setelah

implementasi penuh IFRS. Selain itu, *regulatory environment* adalah faktor yang membatasi manajemen laba paling efektif di antara faktor-faktor yang membatasi manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara hukum legislatif, seperti Brazil, manajemen laba lebih sedikit pada sektor dengan pengaruh penegakan hukum yang lebih. Kesimpulannya, perlu memiliki penegakan hukum yang efektif untuk membatasi manajemen laba di negara hukum legislatif.

#### 5. Dampak Penerapan IFRS di Vietnam

Penelitian Phan dan Mascitelli (2014) meneliti mengenai penerapan IFRS sehubungan dengan pendekatan yang optimal dan waktu penerapan IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFRS di Vietnam perlu dimulai dari *voluntary basis*. Hal ini bertujuan agar perusahaan lebih siap untuk transisi dari pelaporan berdasarkan *Vietnamese accounting standards* (VAS) ke IFRS. Wajib IFRS dapat dilakukan dari struktur kepemilikan modal tertentu, termasuk perusahaan investasi asing, perusahaan publik, perbankan, dan lembaga keuangan. Mengenai pendekatan adopsi optimal, hasil menunjukkan pendekatan konvergensi dan adaptasi lebih diminati daripada pendekatan adopsi penuh. Sehubungan dengan waktu penerapan IFRS yang optimal, jangka waktu 5 tahun dianggap sebagai waktu yang cukup untuk transisi dan persiapan penerapan IFRS.

#### 6. Dampak Penerapan IFRS di Irak

Hassan et al. (2014) meneliti mengenai perkembangan peraturan akuntansi di Irak dan keputusannya dalam menerapkan IFRS serta faktor yang mempengaruhi penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan akuntansi di Irak merupakan hasil dari tiga tekanan isomorfisma kelembagaan (koersif, mimesis, dan normatif). Secara khusus, pengembangan sistem akuntansi, dan memang IFRS adopsi di Irak, hasil dari tekanan koersif yang dihasilkan oleh keterlibatan dengan arena internasional.

Pengembangan lebih lanjut dari rezim akuntansi mungkin hasil dari tekanan normatif dan mimesis. Tekanan normatif dari profesi akuntansi, melalui keanggotaan IFAC dan AOSSG, kemungkinan akan mendorong profesi akuntansi di Irak untuk mencari bantuan dalam program pelatihan akuntansi dan untuk menggabungkan standar IFRS dalam program universitas. Tekanan mimesis berasal dari keinginan untuk menarik perusahaan multinasional dengan investasi langsung melalui pasar modal, dan keinginan untuk menarik mitra asing untuk entitas swasta lokal.

#### 7. Dampak Penerapan IFRS di Indonesia

Penelitian Heykal et al. (2014) menganalisis dampak dari penerapan IFRS dengan kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format laporan keuangan perbankan sebelum pelaksanaan standar keuangan baru (IFRS), telah menyebabkan asimetri informasi antara pihak-pihak pemegang saham manajemen dan juga menyebabkan kemungkinan salah tafsir. Setelah penerapan IFRS, dapat dilihat bahwa penyesuaian akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan nomor 50 dan 55, yang telah direvisi pada tahun 2006 memiliki nilai yang cukup karena mereka telah memenuhi pembentukan cadangan untuk menutupi kerugian selama penerapan IFRS.

Sementara itu, penelitian Perera & Baydoun (2007) mengenai alasan penerapan IFRS di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan IFRS di Indonesia mungkin memicu perubahan dari *credit-insider* ke *equity-outsider*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diharapkan dapat memperkuat peran profesi akuntansi dalam menetapkan dan melaksanakan standar pelaporan keuangan. Namun, beberapa masalah struktural dalam masyarakat disebut sebelumnya, seperti peraturan dan penegakan mekanisme yang tidak memadai, dan kronisme, cenderung bertindak sebagai hambatan dalam proses ini.

Penelitian Cahyonowati & Ratmono (2012) bahwa lingkungan kelembagaan masih belum mendukung penerapan IFRS dan tidak mempengaruhi informasi akuntansi. Temuan studi ini mendukung argumentasi Karampinis dan Hevas (2011) bahwa dalam hukum kode negara (termasuk Indonesia), karakteristik lingkungan kelembagaan perlindungan investor



yang lemah, kurangnya penegakan hukum, kepemilikan terkonsentrasi, dan pendanaan yang berorientasi perbankan penerapan IFRS mungkin tidak dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan IFRS di negara-negara berkembang masih memiliki berbagai kendala sehubungan dengan regulasi dan pengetahuan standar IFRS. Dalam penerapan IFRS diperlukan waktu dalam penerapannya dan sebaiknya dimulai dengan pendekatan *voluntary* agar perusahaan lebih siap dalam menerapkan IFRS. Penerapan IFRS memang meningkatkan kualitas laporan keuangan karena mengurangi praktik manajemen laba, tetapi diperlukan konvergensi dalam negara berkembang karena adanya perbedaan kebijakan pemerintah dan praktik pasar. Masalah pelatihan dan pembelajaran mengenai IFRS juga perlu diterapkan agar profesi akuntansi lebih memahami konsep IFRS

Secara garis besar, penerapan IFRS di Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Penerapan IFRS di Indonesia dimulai dengan masa persiapan yang dilakukan dengan mengembangkan PSAK berbasis IFRS secara bertahap selama periode 2008 sampai 2012. Penerapan IFRS ini juga dilakukan mulai dari pendekatan *voluntary* untuk mempersiapkan perusahaan dalam melakukan adopsi penuh. Walaupun penerapan IFRS dengan menggunakan standar PSAK masih sering dilakukan revisi untuk lebih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono. 2012. Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. halaman 105-115.
- Ding, Y., Xijia Su. 2008. Implementation of IFRS in a regulated market. *Journal Accounting Public Policy*. pages 474–479.
- Grecco, M. P. C., C. M. S. Geron, G. B. Grecco, J. P. C. Lima. 2014. The effect of IFRS on earnings management in Brazilian non-financial public companies. *Emerging Markets Review*. Pages 42–66.
- Hassan E.A., M.Rankin, Wei Lu. 2014. The Development of Accounting Regulation in Iraq and the IFRS Adoption Decision: An Institutional Perspective. *The International Journal of Accounting*. pages 371–390.
- Heykal et al. 2014. Impact Analysis of Indonesian Financial Accounting Standard based on the IFRS Implementation for Financial Instruments in the Indonesian Commercial Bank. *2nd World Conference on Business*. pages 1247–1250.
- Nurunnabi, M. 2014. The impact of cultural factors on the implementation of global accounting standards (IFRS) in a developing country. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*.
- Nurunnabi, M. 2015. Does accounting regulation matter?': An experience of international financial reporting standards implementation in an emerging country. *Research in Accounting Regulation*. pages 230–238.
- Perera, H., N. Baydoun. 2007. Convergence with International Financial Reporting Standards: The Case of Indonesia. *Advances in International Accounting*. pages 201–224.
- Phan, D. H. T., B. Mascitelli. 2014. Optimal approach and timeline for IFRS adoption in Vietnam: Perceptions from accounting professionals. *Research in Accounting Regulation*. pages 222–229.
- Pinnarwan, D., et al. 2014. IFRS and Indonesian GAAP (PSAK): similarities and differences. *PWC publication*.
- Poudel, G., A. Hellman, H. Perera. 2014. The adoption of International Financial Reporting Standards in a non-colonized developing country: The case of Nepal. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*. pages 209–216.

- Purba, Marisi P. 2010. *International Financial Reporting Standards Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinaga, Rosita Uli. 2014. *Update Konvergensi IFRS di Indonesia*.
- Tri Wahyuni, Ersya. 2011. "Konvergensi IFRS di Indonesia: Sejarah, Capaian dan Persepsi Masyarakat". *Proceeding Seminar*.
- Zamzami, Faiz. 2011. *Perkembangan Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia*, halaman 3.
- Zehri, F., J. Chouaibi. 2013. *Adoption determinants of the International Accounting Standards IAS/IFRS by the developing countries*. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*. pages 56-62.